

Studi ini untuk mendeskripsikan mengenai pertanggung jawaban hukum platform e-commerce terhadap izin penjualan makanan dan minuman menurut perspektif Undang-undang no.18 tahun 2012 tentang pangan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dasar hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan label halal pada produk makanan dan minuman yang di perdagangkan di Kota Kediri. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini Di Indonesia, tata cara mengenai perlindungan konsumen, pengelolaan pangan, dan izin edar dalam perdagangan online telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan izin edar diatur Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik. Untuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli pangan impor tanpa izin edar, aturan yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan telah mengatur mekanisme pencegahan pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta penjatuhan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Namun, kenyataannya, perlindungan ini belum mampu menjangkau seluruh aspek perdagangan online, khususnya pada produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar. Hal ini terjadi karena masih belum terdapat aturan khusus yang dapat mengakomodasi berbagai tindakan dalam perdagangan online tersebut.

Kata Kunci : Pangan, Pertanggung jawaban, Dasar hukum, Perlindungan hukum

ABSTRACT

This study aims to describe the legal liability of e-commerce platforms regarding the licensing of food and beverage sales from the perspective of Law No. 18 of 2012 concerning Food. The objective of this research is to examine the legal basis and consumer protection related to the misuse of halal labels on food and beverage products traded in the city of Kediri. This study employs a normative legal research method. The findings of this research indicate that in Indonesia, the procedures concerning consumer protection, food management, and distribution permits in online trade have been regulated by several statutory provisions. Distribution permits are governed by the Regulation of the Head of the Indonesian National Agency of Drug and Food. Regarding legal protection for consumers purchasing imported food without distribution permits, existing regulations such as the Consumer Protection Act, the Food Act, and the Health Act provide mechanisms for the prevention of violations, dispute resolution, and the imposition of sanctions on business actors who violate the law. However, in reality, this protection has not yet been able to cover all aspects of online trade, particularly with respect to imported food products lacking distribution permits. This occurs due to the absence of specific regulations that can accommodate the various actions involved in online commerce.

Keywords: Food, Liability, Legal Basis, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv

DAFTAR PUSTAKA	81
----------------------	----